



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA PHPU 2019

DISAMPAIKAN DALAM ACARA BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN

PERKARA PHPU 2019

Oleh;

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI

- 1 **Persiapan dan Login Partai Politik**
- 2 **Permohonan PPHU Anggota DPR/DPRD Tahun 2019**
- 3 **Keterangan Pihak Terkait Anggota DPR/DPRD Tahun 2019**
- 4 **Tempat Duduk Sidang**
- 5 **Case Retrieval dan Tracking Perkara**
- 6 **Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*);**



PENDAHULUAN

“ UU NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (pasal 466)
“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”

UU NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM pasal 474 ayat 1
“Dalam Hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”

UU NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM pasal 475 ayat 1
“Dalam Hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU”

”

PENDAHULUAN

“

Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk memberikan kemudahan bagi Para Pihak Yang Berperkara di MK sebagai perwujudan administrasi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya.

Dasar hukum pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Mahkamah dalam penanganan perkara konstitusi sesuai kewenangannya:

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 (PMK 18/2009) tentang “Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference)”

”

PERMOHONAN ELEKTRONIK

“

Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (Permohonan Elektronik / Electronic Filing), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (electronic filing), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”

”

Target Pemahaman dalam Bimtek penanganan perkara berbasis elektronik sbb:

- ✓ Mendapatkan Informasi Kemudahan Akses Dalam Berperkara di MK
- ✓ Peran selaku Pemohon dan Pihak Terkait
 - ✓ DPR RI,
 - ✓ DPR PROVINSI
 - ✓ DPR Kabupaten/Kota
- ✓ Informasi dan Layanan Online yang Update

Kemudahan Akses Berperkara di MK

- ✓ Database Calon Peserta Pemilu
- ✓ Pengiriman Dokumen Digital MK ke Kuasa dan Para Pihak melalui email Para Pihak
- ✓ Data Dashboard PHP Pemilu Online
- ✓ Pengajuan Permohonan secara Online
- ✓ Pengajuan Permohonan Offline/Hadir di MK dengan sistem antrian berbasis elektronik
- ✓ Layanan Pojok Digital Mandiri di Gedung MK
- ✓ Live Digitalisasi Online Dokumen Perkara
- ✓ Case Tracking
- ✓ Case Retrieval
- ✓ Click MK
- ✓ Konsultasi dan Tanya Jawab Online
- ✓ Produk Administrasi Kepaniteraan MK sudah bersertifikasi elektronik sehingga tidak bisa dipalsukan
- ✓ Jadwal Sidang, Putusan dan Risalah Sidang
- ✓ Hubungi MK
- ✓ Persidangan Jarak Jauh
- ✓ Streaming Persidangan MK
- ✓ Pengaduan ke MK

Persiapan Sebuah Permohonan Online

- ✓ Paket Internet
- ✓ Smartphone
- ✓ Dekstop/Notebook
- ✓ Camera Photo Smartphone
- ✓ E-Mail di smartphone dan Dekstop
- ✓ Whatsapp Web
- ✓ Hotspot Seluler 4G
- ✓ KTP
- ✓ Alamat Email
- ✓ Nomor HP
- ✓ Daftar Kuasa Hukum jika menggunakan kuasa
- ✓ Digitalisasi Materi Permohonan
- ✓ Dipersiapkan oleh DPP Partai Politik dan Dapat dibantu oleh seluruh DPD Partai Politik

Pentingnya e-mail dan Nomor HP Para Pihak

Email Para Pihak akan senantiasa rutin mendapatkan Dokumen Administrasi Kepaniteraan dan Dokumen Hukum Mahkamah Konstitusi:

- ✓ Mendapatkan login untuk mengajukan permohonan online dan mendapatkan Tanda Terima Online
- ✓ Mendapatkan Dokumen Administrasi Kepaniteraan MK: Akta Penerimaan Permohonan Pemohon, Akta Permohonan Lengkap/Belum Lengkap, Akta Registrasi Perkara, Pemberitahuan Sidang Pertama, Penyampaian Jadwal Sidang, Penyampaian Salinan Permohonan, Penyampaian Jawaban Termohon, Penyampaian Keterangan Pihak Terkait, Penyampaian Salinan Putusan
- ✓ Seluruh dokumen produk MK telah menggunakan sertifikasi dan tanda tangan elektronik

Pentingnya Nomor HP Para Pihak

- ✓ Sebagai media komunikasi yang handal antara Juru Panggil MK dengan Para Pihak

Pentingnya Smpel

- ✓ Memberikan Kemudahan Para Pihak dalam mengajukan permohonan online di MK
- ✓ Menyimpan semua dokumen permohonan dan tanda terima permohonan
- ✓ Menyimpan tracking permohonan, jawaban termohon dan keterangan pihak terkait
- ✓ Media untuk mendaftarkan tempat duduk di ruang sidang dan plotting kehadiran para pihak di MK secara online
- ✓ Smpel senantiasa always on dan siap dientry kapanpun dan tidak pernah ada penolakan terkait waktu.

Pengajuan Permohonan Hadir di MK (Offline)

- ✓ Menyiapkan Dokumen Permohonan Per Propinsi
- ✓ Mengisi dan mendapatkan NUPP
- ✓ Memilih Para Pihak (Capres/Cawapres, Partai Politik (Parpol), Dewan Perwakilan Daerah (DPD)).
- ✓ Memilih Propinsi
- ✓ Masukkan NIK dan Nomor HP
- ✓ Foto Diri
- ✓ Mendapatkan Waktu Permohonan
- ✓ Menunggu Panggilan Antrian

SIMPEL

(SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ONLINE)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)

“Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik”



1. Persiapan dan Login Partai Politik ;

Kemudahan Berperkara di MK

- ✓ Pengajuan Permohonan Online
- ✓ Pengajuan Permohonan Offline/Hadir di MK, NUPP dan Pojok Digital

Persiapan Sebuah Permohonan Online

- ✓ Paket Internet
- ✓ Smartphone
- ✓ Camera Photo Smartphone
- ✓ E-Mail di smartphone
- ✓ Whatsapp Web
- ✓ Dekstop/Notebook
- ✓ Hotspot Selulair
- ✓ KTP
- ✓ Alamat Email
- ✓ Nomor HP
- ✓ Daftar Kuasa Hukum jika menggunakan kuasa
- ✓ Digitalisasi Materi Permohonan
- ✓ Dipersiapkan oleh DPP Partai Politik dan Dapat dibantu oleh seluruh DPD Partai Politik

Legal Standing DPP Partai Politik

- ✓ Pengajuan Permohonan Pemohon
- ✓ Pengajuan Permohonan Keterangan Pihak Terkait

Pentingnya Peran DPP Partai Politik dan DPD Partai Politik

- ✓ Dengan dibatasinya waktu pengajuan permohonan perkara di MK sangat penting mengelola hubungan kerja DPP Partai Politik dan DPD Partai Politik
- ✓ DPP Partai Politik adalah Pemilik Legal Standing Pengajuan Permohonan Perkara dan Pengajuan Keterangan Pihak Terkait
- ✓ DPD Partai Politik adalah bagian organ DPP Partai Politik yang memiliki data terkait dengan objek yang di sengketakan oleh Para Pihak. Obyek yang disengketakan yaitu keputusan KPU Provinsi, KPU Kabutapen/Kota

Pentingnya e-mail dan Nomor HP Para Pihak

Email Para Pihak akan senantiasa rutin mendapatkan Dokumen Administrasi Kepaniteraan dan Dokumen Hukum Mahkamah Konstitusi:

- ✓ Mendapatkan login untuk mengajukan permohonan online dan mendapatkan Tanda Terima Online
- ✓ Mendapatkan Dokumen Administrasi Kepaniteraan MK: Akta Pengajuan Permohonan Pemohon, Akta Permohonan Lengkap/Belum Lengkap, Akta Registrasi Perkara Konstitusi, Pemberitahuan Sidang Pertama, Penyampaian Jadwal Sidang, Penyampaian Salinan Permohonan, Penyampaian Jawaban Termohon, Penyampaian Keterangan Pihak Terkait, Penyampaian Salinan Putusan
- ✓ Seluruh dokumen produk MK telah menggunakan sertifikasi dan tanda tangan elektronik

Pentingnya Nomor HP Para Pihak

- ✓ Sebagai media komunikasi yang handal antara Juru Panggil MK dengan Para Pihak

Pentingnya Sempel

- ✓ Memberikan Kemudahan Para Pihak dalam mengajukan permohonan online di MK
- ✓ Menyimpan semua dokumen permohonan dan tanda terima permohonan
- ✓ Menyimpan tracking permohonan, jawaban termohon dan keterangan pihak terkait
- ✓ Media untuk mendaftarkan tempat duduk di ruang sidang dan plotting kehadiran para pihak di MK secara online
- ✓ Sempel senantiasa always on dan siap dientry kapanpun dan tidak pernah ada penolakan terkait waktu.

Sertifikasi Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik

- ✓ Pengganti tanda tangan basah yang valid dan sama nilainya dengan tanda tangan basah
- ✓ Tanda Tangan elektronik MK tersertifikasi langsung dengan BSSN (Badan Syber Sandi Negara)
- ✓ Dokumen Elektronik MK Otentik dan dapat diuji dengan smartphone dimanapun berada
- ✓ Tidak dapat dipalsukan walaupun penambahan ataupun pengurangan sebuah titik (.), koma (,) maupun spasi ()
- ✓ Pemberlakuan UU ITE Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Informasi dan Layanan Online MK lainnya

- Case Retrieval
- Case Tracking
- Hubungi MK
- Dewan Etik
- Email MK
- Telpon MK
- Konsultasi MK
- Jadwal Sidang MK
- Putusan MK
- Risalah MK
- Streaming dan Persidangan Jarak Jauh MK



2. Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

DPP partai politik harus mendaftarkan pada SIMPEL untuk mendapatkan akun log in DPP Partai Politik. Langkah berikutnya DPP Partai Politik akan mengisi profile DPP Partai Politik

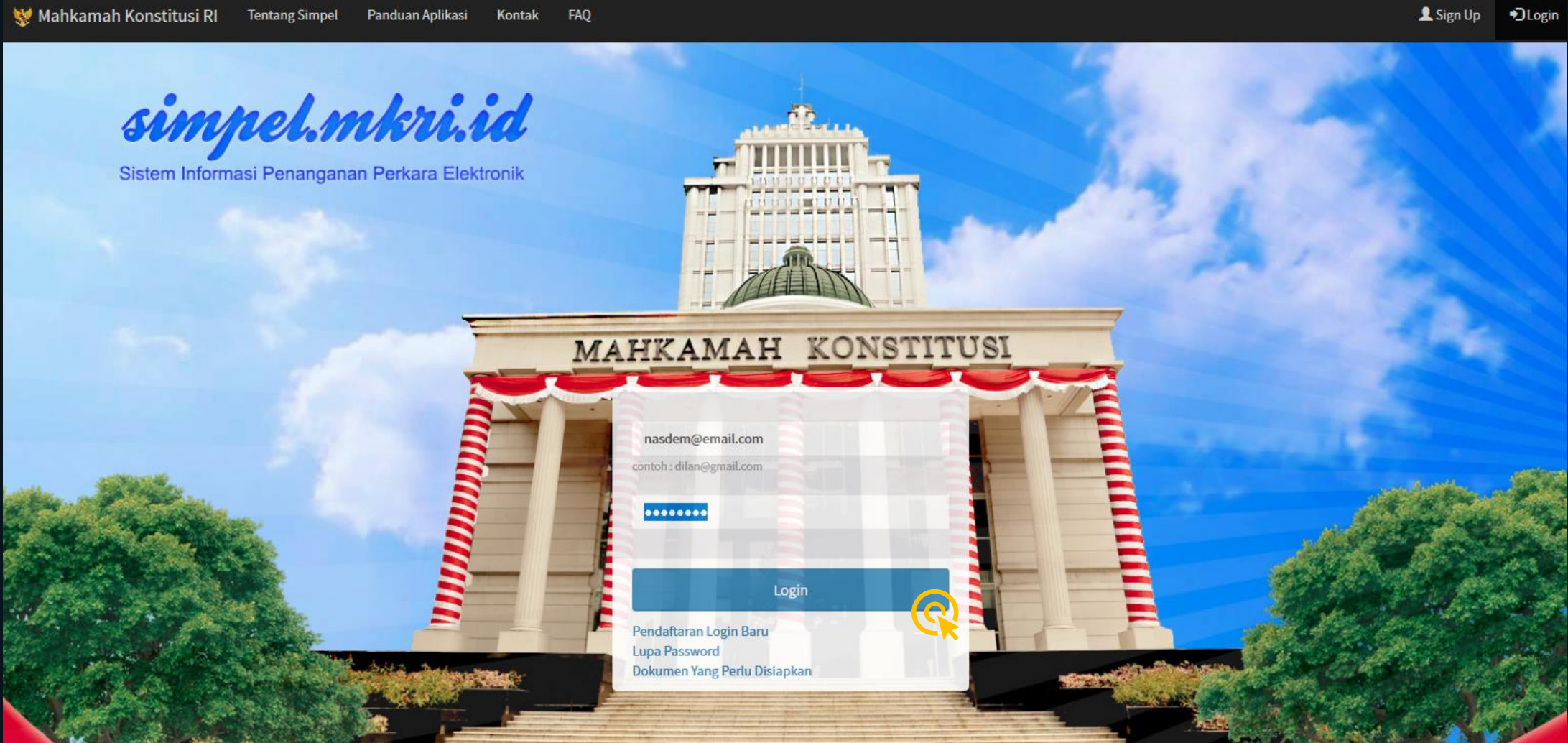
PMK Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (1):

“Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan melalui Permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon”

PMK Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (2):

“Pemohon atau kuasa hukum menyerahkan Permohonan asli dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan”

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai



Login setelah daftar akun sebagai DPP Partai Politik

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

The screenshot displays the SIMPEL web application interface. The top navigation bar includes the SIMPEL logo, a user profile for 'nasdem@email.com', and a breadcrumb trail: 'Dashboard > Pileg 2019 > Keterangan Pihak Terkait'. The main content area is titled 'List Perkara DPRD/DPRD' with a subtitle 'Persetisihan Pemilihan Legislatif DPRD/DPRD Tahun 2019'. Below this, there is a section for 'Permohonan Online' containing a table with the following structure:

#	No Perkara	Permohonan	Aksi
---	------------	------------	------

The left sidebar contains a navigation menu with items: Dashboard, Pileg 2019 (with sub-items: Pengajuan Permohonan, Pengajuan Perorangan, Informasi Permohonan, Keterangan Pihak Terkait), Kunjungan Sidang, Informasi Perkara, Kuasa Hukum, and Bantuan. At the bottom of the sidebar, the date and time are shown: 'Selasa, 16 Oktober 2018' and '14:07:53'.

Partai Politik setelah *log in* pada tampilan utama, dapat mendaftarkan pengajuan permohonan 34 provinsi, memilih kuasa hukum lebih dari 1;

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The header includes the SIMPEL logo and the user email 'pkb@email.com'. The left sidebar contains navigation options: Dashboard, Pileg 2019 (with sub-items: Pengajuan Permohonan, Pengajuan Perorangan, Informasi Permohonan), Kunjungan Sidang, Informasi Perkara, Kuasa Hukum, Dewan Pimpinan Daerah, and Bantuan. The main content area is titled 'Permohonan Online' and 'Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR/DPRD'. It features a large heading 'PERMOHONAN ONLINE PERKARA PEMILU LEGISLATIF' and a paragraph explaining that the ticket creation date and time are used for application submission, with a 1x24 hour validity period. A blue button labeled 'Buat Tiket Pengajuan Permohonan' is highlighted with a yellow magnifying glass icon.

Waktu pembuatan tiket adalah waktu yang dicatat dalam pengajuan permohonan (APPP). Pemohon dapat melengkapi permohonan dalam waktu 1 x 24 jam setelah pembuatan tiket. Tiket akan hilang secara

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

SIMPEL nasdem@email.com Online

Permohonan Online Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR/DPRD

Dashboard > Pilleg 2019 > List Permohonan > Pilih Provinsi

PILIH PROVINSI YANG BERSENGKETA

<input type="checkbox"/> Aceh	<input type="checkbox"/> Sumatera Utara (Sumut)	<input type="checkbox"/> Sumatera Barat (Sumbar)
<input checked="" type="checkbox"/> Riau	<input type="checkbox"/> Jambi	<input type="checkbox"/> Sumatera Selatan (Sumsel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kepulauan Bangka Belitung	<input type="checkbox"/> Bengkulu	<input type="checkbox"/> Lampung
<input type="checkbox"/> Kepulauan Riau	<input type="checkbox"/> Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta)	<input type="checkbox"/> Jawa Barat (Jabar)
<input checked="" type="checkbox"/> Jawa Tengah (Jateng)	<input type="checkbox"/> Jawa Timur (Jatim)	<input type="checkbox"/> Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
<input type="checkbox"/> Banten	<input type="checkbox"/> Bali	<input type="checkbox"/> Nusa Tenggara Barat (NTB)
<input type="checkbox"/> Nusa Tenggara Timur (NTT)	<input type="checkbox"/> Kalimantan Barat (Kalbar)	<input type="checkbox"/> Kalimantan Tengah (Kalteng)
<input type="checkbox"/> Kalimantan Selatan (Kalsel)	<input type="checkbox"/> Kalimantan Timur (Kaltim)	<input type="checkbox"/> Kalimantan Utara (Kaltara)
<input type="checkbox"/> Sulawesi Utara (Sulut)	<input type="checkbox"/> Sulawesi Tengah (Sulteng)	<input type="checkbox"/> Sulawesi Selatan (Sulsel)
<input type="checkbox"/> Sulawesi Barat (Sulbar)	<input type="checkbox"/> Sulawesi Tenggara (Sultra)	<input type="checkbox"/> Gorontalo
<input type="checkbox"/> Maluku	<input type="checkbox"/> Maluku Utara (Malut)	<input type="checkbox"/> Papua
<input type="checkbox"/> Papua Barat		

Simpan

DPP Partai Politik memilih Provinsi yang menjadi objek perselisihan hasil pemilu

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

The screenshot displays the SIMPEL web application interface. The top navigation bar includes the SIMPEL logo, a user profile for 'nasdem@email.com', and a menu icon. The left sidebar contains navigation options: Dashboard, Pileg 2019 (with sub-items for Pengajuan Permohonan, Pengajuan Perorangan, Informasi Permohonan, and Keterangan Pihak Terkait), Kunjungan Sidang, Informasi Perkara, Kuasa Hukum, and Bantuan. The main content area is titled 'Permohonan Online' and 'Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR/DPRD'. It features a prominent warning message: 'Tanggal Tiket 15-10-2018 pukul 22:54 WIB' and 'Tiket berlaku sampai tanggal 16-10-2018 pukul 22:54 WIB', with a yellow circular arrow icon pointing to the deadline. Below this, a text instruction states: 'Anda harus melengkapi data permohonan per Provinsi sebelum masa berlaku tiket habis.' Three input fields are shown, containing the text: '1. Kepulauan Bangka Belitung', '2. Kepulauan Riau', and '3. Jawa Tengah (Jateng)'. At the bottom of the page, another warning message is visible: 'Tanggal Tiket 16-10-2018 pukul 14:00 WIB' and 'Tiket berlaku sampai tanggal 17-10-2018 pukul 14:00 WIB', followed by the same instruction: 'Anda harus melengkapi data permohonan per Provinsi sebelum masa berlaku tiket habis.'

Contoh DPP Partai Politik telah memilih 3 Provinsi yang menjadi objek perselisihan hasil pemilu pada

15 Oktober 2018 pukul 22.54

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

SIMPEL nasdem@email.com Online

Permohonan Online Perselisihan Pemilihan Legislatif DPR/DPRD Tahun 2019

Dashboard > Pileg 2019 > List Permohonan > Permohonan Online

Permohonan Online

Provinsi: Jawa Tengah (Jateng)

Menunjuk Kuasa: TIDAK

Pemohon

Partai Politik	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
Nama Ketua	Surya Paloh
Nama Sekjen	JOHNNY G. PLATE
Alamat	Jalan Jalan No 1
Email	nasdem@email.com
Nomor Telepon	
Nomor Handphone	08111111111

Permohonan

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif DPR,DPRD Provinsi Jawa Tengah Jateng Tahun 2019

[Simpan Sementara](#) [Selanjutnya](#)

DPP Partai Politik melengkapi isian aplikasi PPHU DPR/DPRD Tahun 2019

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

SIMPEL nasdem@email.com Online

Dashboard | Pileg 2019 | Kunjungan Sidang | Informasi Perkara | Kuasa Hukum | Bantuan

Selasa, 16 Oktober 2018
14:27:47

Permohonan Online Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR/DPRD

Dashboard > Pileg 2019 > List Permohonan > Permohonan Online

PILIH DAERAH PEMILIHAN YANG BERSENGKETA

DAPIL ANGGOTA DPR

<input type="checkbox"/> Jateng I Partai Terkait	<input checked="" type="checkbox"/> Jateng II Partai Terkait	<input checked="" type="checkbox"/> Jateng III Partai Terkait
<input type="checkbox"/> Jateng IV Partai Terkait	<input type="checkbox"/> Jateng V Partai Terkait	<input type="checkbox"/> Jateng VI Partai Terkait
<input type="checkbox"/> Jateng VII Partai Terkait	<input type="checkbox"/> Jateng VIII Partai Terkait	<input type="checkbox"/> Jateng IX Partai Terkait
<input type="checkbox"/> Jateng X Partai Terkait		

DAPIL ANGGOTA DPRD

<input type="checkbox"/> Jawa Tengah 1 Partai Terkait	<input type="checkbox"/> Jawa Tengah 2 Partai Terkait	<input type="checkbox"/> Jawa Tengah 3 Partai Terkait
<input type="checkbox"/> Jawa Tengah 4 Partai Terkait	<input type="checkbox"/> Jawa Tengah 5 Partai Terkait	<input type="checkbox"/> Jawa Tengah 6 Partai Terkait
<input type="checkbox"/> Jawa Tengah 7 Partai Terkait	<input type="checkbox"/> Jawa Tengah 8 Partai Terkait	<input type="checkbox"/> Jawa Tengah 9 Partai Terkait
<input type="checkbox"/> Jawa Tengah 10 Partai Terkait	<input type="checkbox"/> Jawa Tengah 11 Partai Terkait	<input type="checkbox"/> Jawa Tengah 12 Partai Terkait
<input type="checkbox"/> Jawa Tengah 13 Partai Terkait		

DPP Partai Politik memilih pihak terkait sesuai dapil DPR/DPRD yang hendak diajukan permohonan

PHPU DPR/DPRD Tahun 2019

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

The screenshot displays the SIMPEL web application interface. The top navigation bar includes the SIMPEL logo, a user profile for 'pkb@email.com', and a breadcrumb trail: 'Dashboard > Pileg 2019 > List Permohonan > Permohonan Online'. The main content area shows the 'Permohonan Online' page for 'Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR/DPRD'. A modal window titled 'Partai Politik Terkait - Google Chrome' is open, displaying the 'PILIH PARTAI POLITIK TERKAIT' form. The form contains a grid of 15 checkboxes for various political parties. The 'Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)' checkbox is selected. At the bottom of the form are 'Tutup' (Close) and 'Simpan' (Save) buttons. The background dashboard includes a sidebar with menu items like 'Dashboard', 'Pileg 2019', 'Kunjungan Sidang', 'Informasi Perkara', 'Kuasa Hukum', 'Dewan Pimpinan Daerah', and 'Bantuan'. The date and time are shown as 'Rabu, 26 September 2018 22:11:10'.

PILIH PARTAI POLITIK TERKAIT

<input type="checkbox"/> Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	<input checked="" type="checkbox"/> Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	<input type="checkbox"/> Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
<input type="checkbox"/> Partai Golongan Karya (Golkar)	<input type="checkbox"/> Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	<input type="checkbox"/> Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
<input type="checkbox"/> Partai Beringin Karya (Berkarya)	<input type="checkbox"/> Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	<input type="checkbox"/> Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
<input type="checkbox"/> Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	<input type="checkbox"/> Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	<input type="checkbox"/> Partai Amanat Nasional (PAN)
<input type="checkbox"/> Partai Hati Nurani (Hanura)	<input type="checkbox"/> Partai Demokrat	<input type="checkbox"/> Partai Bulan Bintang (PBB)
<input type="checkbox"/> Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)		

Tutup Simpan

DPP Partai Politik melakukan pemilihan pihak terkait PHPU DPR/DPRD Tahun 2019

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The top navigation bar includes the SIMPEL logo, a user profile for 'nasdem@email.com', and a user icon. The left sidebar contains a menu with items like 'Dashboard', 'Pileg 2019', 'Kunjungan Sidang', 'Informasi Perkara', 'Kuasa Hukum', and 'Bantuan'. The main content area is titled 'Upload Berkas Permohonan' and lists seven categories of documents to be uploaded: 'KTP Pemohon', 'Permohonan', 'Permohonan DOC', 'Daftar Alat/Dokumen Bukti', 'Alat/Dokumen Bukti', 'Surat Keputusan Termohon', and 'Surat Persetujuan Partai'. Each category has a 'Telusuri...' button, a status message 'Tidak ada berkas dipilih.', and an 'Upload' button. Below the upload area, there is a row of icons representing the document types: 'KTP Pemohon', 'Permohonan', 'Permohonan', 'Daftar Alat Bukti', 'Alat Bukti', 'SK Termohon', and 'Surat Persetujuan Partai'. At the bottom right, there is a 'Kirim Permohonan' button.

SIMPEL nasdem@email.com Online

Dashboard

Pileg 2019

- Pengajuan Permohonan
- Pengajuan Perorangan
- Informasi Permohonan
- Keterangan Pihak Terkait

Kunjungan Sidang

Informasi Perkara

Kuasa Hukum

Bantuan

Selasa, 16 Oktober 2018
13:42:32

Upload Berkas Permohonan

KTP Pemohon

Telusuri... Tidak ada berkas dipilih.
*) File harus dengan ekstensi (.jpg/.png/.gif) dan Ukuran file maksimal : 1 MB

Upload

Permohonan

Telusuri... Tidak ada berkas dipilih.
*) File harus dengan ekstensi (.pdf) file maksimal : 3 MB

Upload

Permohonan DOC

Telusuri... Tidak ada berkas dipilih.
*) File harus dengan ekstensi (.doc) dan ukuran file maksimal : 3 MB

Upload

Daftar Alat/Dokumen Bukti

Telusuri... Tidak ada berkas dipilih.
*) File harus dengan ekstensi (.doc/.docx/.xls/.xlsx) dan ukuran file maksimal : 1 MB

Upload

Alat/Dokumen Bukti

Telusuri... Tidak ada berkas dipilih.
File harus dengan ekstensi (.doc/.docx/.xls/.xlsx) dan ukuran file maksimal : 3 MB

Upload

Surat Keputusan Termohon

Telusuri... Tidak ada berkas dipilih.
*) File harus dengan ekstensi (.pdf) dan ukuran file maksimal : 5 MB

Upload

Surat Persetujuan Partai

Telusuri... Tidak ada berkas dipilih.
*) File harus dengan ekstensi (.pdf) dan ukuran file maksimal : 3 MB

Upload

KTP Pemohon

Permohonan

Permohonan

Daftar Alat Bukti

Alat Bukti

SK Termohon

Surat Persetujuan Partai

Kembali Simpan Sementara

Kirim Permohonan

Setelah berhasil
upload Berkas
Permohonan

Partai Politik melakukan proses upload/unggah berkas permohonan PPHU DPR/DPRD Tahun 2019

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

SIMPEL nasdem@email.com Online

Dashboard

Pileg 2019

- Pengajuan Permohonan
- Pengajuan Perorangan
- Informasi Permohonan
- Keterangan Pihak Terkait

Kunjungan Sidang

Informasi Perkara

Kuasa Hukum

Bantuan

Selasa, 16 Oktober 2018
13:43:03

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id


TANDA TERIMA PERMOHONAN ONLINE
Nomor Online : 3/PAN.ONLINE/DPR-DPRD/2019

Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif DPR,DPRD Provinsi Jawa Tengah Jateng Tahun 2019

Pemohon : Partai Nasional Demokrat Nasdem

Kuasa Pemohon :

Tanggal : 15 Oktober 2018 Pukul : 22:54 WIB



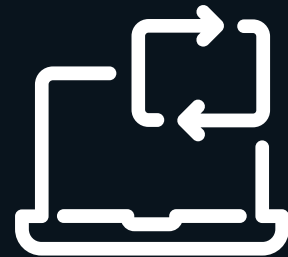
NO.	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	KTP Pemohon	ADA
3	Keputusan Termohon	ADA
4	Daftar Alat/Dokumen Bukti	ADA
5	Alat/Dokumen Bukti	ADA
6	Surat Referensi Partai	ADA
7	Surat Kuasa	TIDAK ADA
8	KTP Kuasa	TIDAK ADA

Panitera
TTD
Kasianur Sidauruk

Pemohon
Partai Nasional Demokrat Nasdem

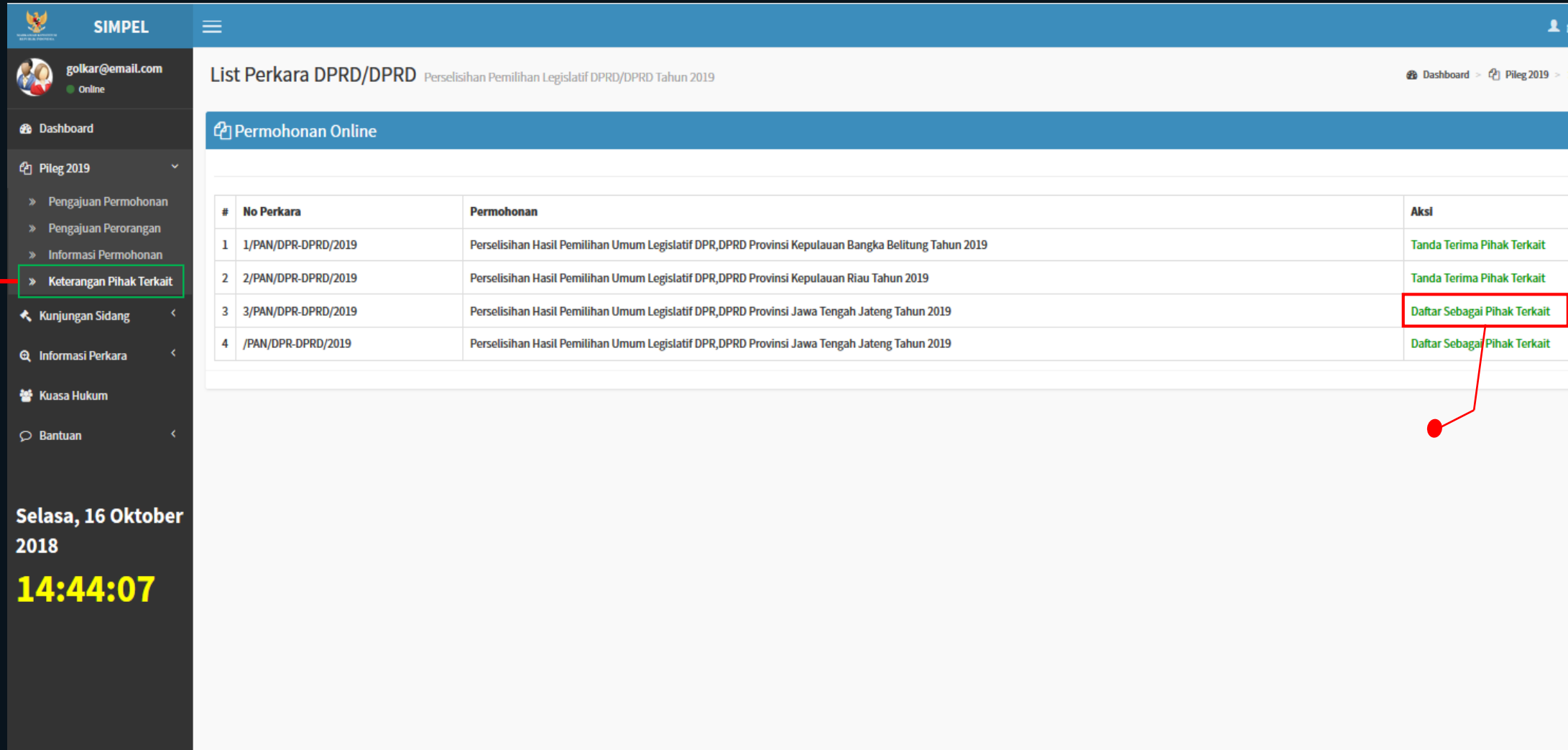
Catatan :
1. Tanda terima permohonan online ini bukan bukti bahwa permohonan telah diregistrasi.
2. Pemohon dapat melengkapi berkas permohonan dengan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan masing-masing 4 rangkap agar dapat diperiksa syarat kelengkapannya.
3. Apabila yang menyerahkan bukan pemohon atau kuasa hukumnya harus ada surat kuasa untuk menyerahkan berkas.

DPP Partai Politik mendapatkan tanda terima online permohonan PHPU DPR/DPRD Tahun 2019



3. Keterangan Pihak Terkait Anggota DPR/DPRD Tahun 2019

Keterangan Pihak Terkait Anggota DPR/DPRD Tahun 2019



The screenshot displays the SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Elektronik) dashboard. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Dashboard, Pileg 2019 (with sub-items: Pengajuan Permohonan, Pengajuan Perorangan, Informasi Permohonan, and Keterangan Pihak Terkait), Kunjungan Sidang, Informasi Perkara, Kuasa Hukum, and Bantuan. The 'Keterangan Pihak Terkait' menu item is highlighted with a red box and a red circle, with a red line pointing to the text 'Pilih menu Keterangan Pihak Terkait' on the left. The main content area shows the 'List Perkara DPRD/DPRD' for the year 2019. A blue header bar reads 'Permohonan Online'. Below this is a table with four rows of legislative cases. The 'Aksi' column for the third row contains the text 'Daftar Sebagai Pihak Terkait', which is highlighted with a red box and a red circle, with a red line pointing to the text 'Tampilan dashboard daftar sebagai pihak terkait' at the bottom of the image.

SIMPEL

golkar@email.com
Online

Dashboard

Pileg 2019

- Pengajuan Permohonan
- Pengajuan Perorangan
- Informasi Permohonan
- Keterangan Pihak Terkait**
- Kunjungan Sidang
- Informasi Perkara
- Kuasa Hukum
- Bantuan

Selasa, 16 Oktober 2018
14:44:07

List Perkara DPRD/DPRD Perselisihan Pemilihan Legislatif DPRD/DPRD Tahun 2019

Permohonan Online

#	No Perkara	Permohonan	Aksi
1	1/PAN/DPR-DPRD/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif DPR,DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019	Tanda Terima Pihak Terkait
2	2/PAN/DPR-DPRD/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif DPR,DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019	Tanda Terima Pihak Terkait
3	3/PAN/DPR-DPRD/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif DPR,DPRD Provinsi Jawa Tengah Jateng Tahun 2019	Daftar Sebagai Pihak Terkait
4	/PAN/DPR-DPRD/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif DPR,DPRD Provinsi Jawa Tengah Jateng Tahun 2019	Daftar Sebagai Pihak Terkait

Tampilan dashboard daftar sebagai pihak terkait

Keterangan Pihak Terkait Anggota DPR/DPRD Tahun 2019

SIMPEL golkar@email.com Online

Permohonan Online

Keterangan Pihak Terkait

Nomor Perkara	5/PAN/DPR-DPRD/2019
Nama Pihak Terkait	<input type="text"/>
No Urut	0
Email Pihak Terkait	<input type="text"/>
Pokok Keterangan	Keterangan pihak terkait terhadap perkara nomor 5/PAN/DPR-DPRD/2019
Kuasa Pihak Terkait	<input type="text"/>
Email Kuasa Pihak Terkait	<input type="text"/>
Tanggal Surat Kuasa	<input type="text"/>
Upload Surat Kuasa	Telusuri... Tidak ada berkas dipilih.
Upload Keterangan Pihak Terkait	Telusuri... Tidak ada berkas dipilih.
Upload Keputusan Termohon	Telusuri... Tidak ada berkas dipilih.
Upload Daftar Alat Bukti	Telusuri... Tidak ada berkas dipilih.

Simpan Permohonan

Melengkapi form keterangan pihak terkait dan mengupload/ unggah dokumen

Keterangan Pihak Terkait Anggota DPR/DPRD Tahun 2019

SIMPEL golkar@email.com Online

Dashboard Pileg 2019 Pengajuan Permohonan Pengajuan Perorangan Informasi Permohonan Keterangan Pihak Terkait Kunjungan Sidang Informasi Perkara Kuasa Hukum Bantuan

Selasa, 16 Oktober 2018
14:50:12

Tanda Terima Permohonan Online Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Dashboard Pileg 2019 Tanda Terima Keterangan Pihak Terkait

Permohonan Online

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

TANDA TERIMA KETERANGAN PIHAK TERKAIT ONLINE
Nomor Online : 3/PAN.ONLINE/TERKAIT-DPR/DPRD/2019

Nomor Perkara : 3/PAN/DPR-DPRD/2019

Nama Pihak Terkait : Adam Ghuzale


No Urut : 3

Pokok Keterangan : Keterangan pihak terkait terhadap perkara nomor 3/PAN/DPR-DPRD/2019

Kuasa Pihak Terkait : Kuasa 1

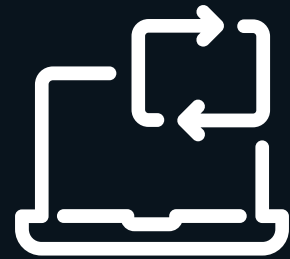
Tanggal : 16 Oktober 2018 Pukul : 14:50 WIB

Panitera Pihak Terkait
TTD
Kasianur Sidauruk



NO.	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1.	KETERANGAN PIHAK TERKAIT	ADA
2.	KEPUTUSAN TERMOHON	ADA
3.	SURAT KUASA	ADA
4.	DAFTAR ALAT BUKTI	ADA

Tanda terima keterangan pihak terkait online



4. Tracking Perkara;

Tracking Perkara

The screenshot shows the search interface of the Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) website. The browser address bar shows <https://search.mkri.id>. The page features a search bar with the text "Cari" and a magnifying glass icon. Below the search bar, there are four tabs: "PUU", "SKLN", "PHPU", and "PHPKADA".

On the left side, there are three filter sections:

- Jenis dokumen**: A list of document types with radio buttons and counts: Putusan (2.937), Ikhtisar Putusan (245), Risalah Persidangan (9.283), and Anotasi (58).
- Jenis perkara**: A list of case types with checkboxes and counts: Semua jenis perkara (6.474), PUU (124), SKLN (622), PHPU.A (66), PHPU.C (75), PHPU.C1 (23), and PHPU.D (4.046).
- Amar putusan**: A list of decision types with checkboxes and counts: Semua amar putusan (1.275), Ditolak (149), and Dikabulkan sebagian (278).

On the right side, there are three case cards, each with a "Case tracking" button:

- Case 1**: 82/PUU-XVI/2018 Putusan. Title: **Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**. Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA. Tanggal diucapkan: 26 November 2018.
- Case 2**: 79/PUU-XVI/2018 Putusan. Title: **Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**. Amar putusan: 1.MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON SEPANJANG BERKENAAN DENGAN PASAL 3 AYAT (1) HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TIDAK DAPAT DITERIMA; 2.MENOLAK PERMOHONAN PARA PEMOHON UNTUK SELAIN DAN SELEBIHNYA. Tanggal diucapkan: 26 November 2018.
- Case 3**: 78/PUU-XVI/2018 Putusan.

Monitoring status perkara

Tracking Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Paniai Tahun 2018



PROSES


STEP	TANGGAL	PROSES	FILE
1	01-08-2018	Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 72/1/PAN.MK/2018	PermohonanPermohonan AP3 dan DKPP
2	02-08-2018	Penerbitan APL dan DPKP2 dengan Nomor 71/2/PAN.MK/2018	APL dan DPKP2
3	06-08-2018	Penyerahan Perbaikan Permohonan	
4	06-08-2018	Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 71/3/PAN.MK/2018	ARPK
5	06-08-2018	Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 283/PAN.MK/8/2018 dan Ketetapan Sidang Pertama dengan nomor 71/TAP.MK/2018	Ketetapan Sidang Pertama

Monitoring status perkara



5. Tempat Duduk Sidang;

Jadwal Sidang: Penentuan Tempat Duduk Sidang

 SIMPEL ishak.purnama4@gmail.com

Kunjungan Sidang Jadwal Sidang Dashboard > > Kunjungan Sidang > > Jadwal Sidang

[Jadwal Sidang Pemohon](#)

#	WAKTU SIDANG	NOMOR PERKARA	ACARA SIDANG	KEHADIRAN
1	2018-09-26, 13:30 WIB	61/PHP.BUP-XVI/2018	Pengucapan Putusan	Kehadiran

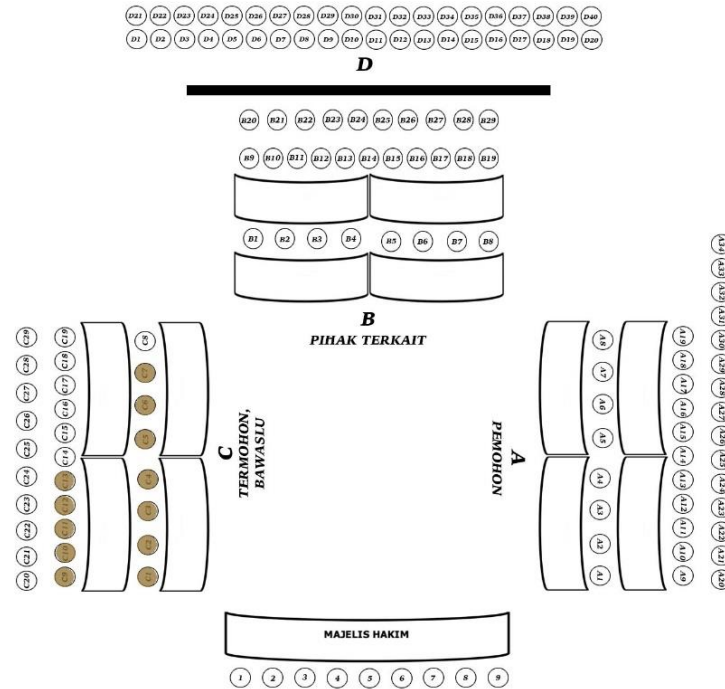
Kamis, 4 Oktober 2018
14:06:58

List jadwal sidang untuk menentukan tempat duduk sidang

Penentuan Tempat Duduk Sidang

Jadwal Sidang

Nomor Perkara	Acara Sidang	Tanggal Ketetapan Hari Sidang	Tanggal Sidang	Waktu Sidang	Lokasi
61/PHP.BUP-XVI/2018	Pengucapan Putusan		26-09-2018	13:30	PANEL 3



Denah ruang sidang



6. **Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*);**

Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)

Dalam rangka penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan antara lain dengan melaksanakan persidangan jarak jauh, yaitu:

- a. mempermudah masyarakat pencari keadilan dan stakeholder mengikuti proses persidangan dalam arti tidak selalu harus hadir secara fisik ke ruang sidang MK,
- b. menekan biaya persidangan bagi masyarakat pencari keadilan dalam arti biaya yang akan ditanggung oleh masyarakat pencari keadilan cukup ringan.

PMK 18/2009 Pasal 16 ayat (3)

“Pemeriksaan persidangan jarak jauh adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap pemohon dan/atau termohon maupun kuasanya, saksi dan/atau ahli yang dilakukan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan secara offline.”

Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)

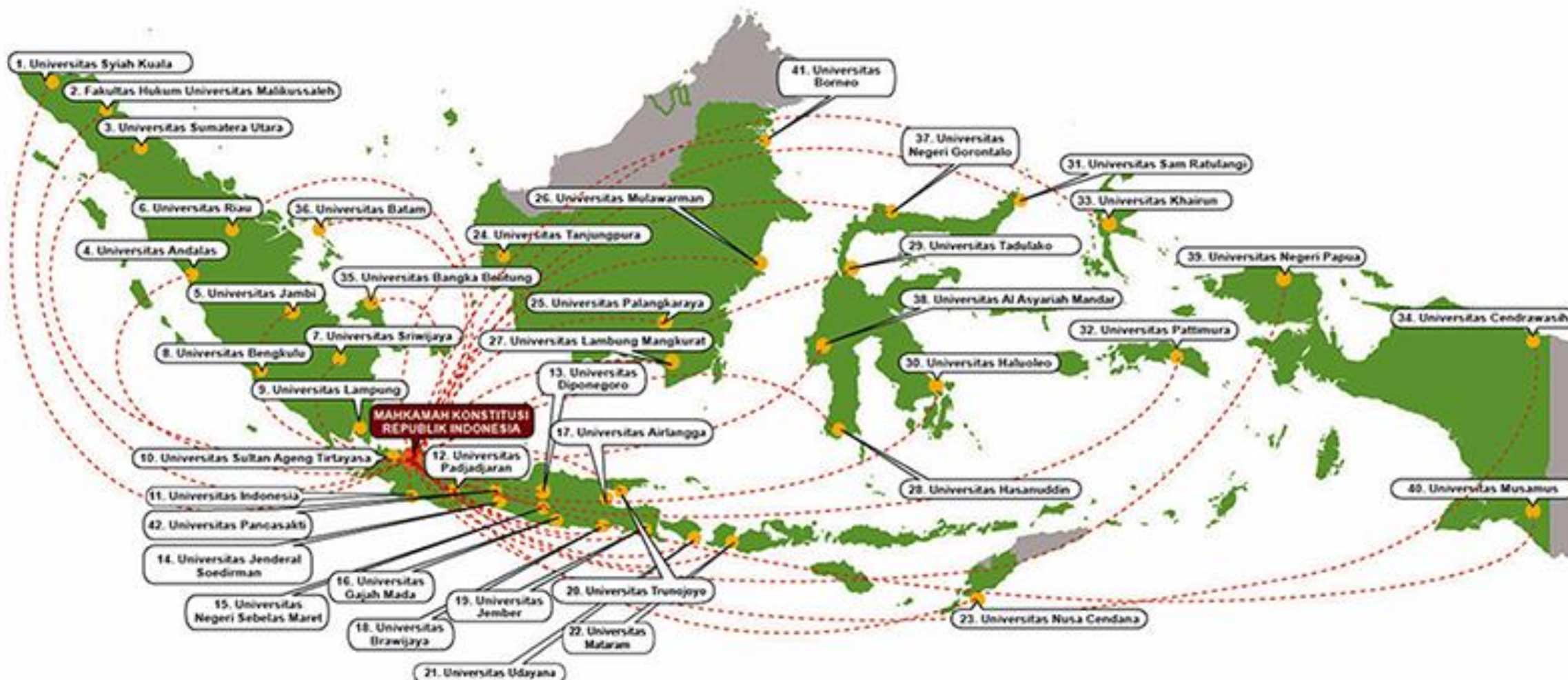
NO	PERGURUAN TINGGI	ALAMAT	NO	PERGURUAN TINGGI	ALAMAT
1	FH Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam	12	FH Universitas Padjadjaran	Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung , Jawa Barat 40132
2	FH Universitas Malikussaleh (Provinsi Aceh)	Kampus Bukit Indah, Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141	13	FH Universitas Diponegoro (Jawa Tengah)	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214
3	FH Universitas Sumatera Utara	Jl. Universitas No.4 Padang Bulan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155	14	FH Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
4	FH Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat	15	FH Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
5	FH Universitas Jambi (Kampus Pinang Masak)	Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 363631	16	FH Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
6	FH Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau	17	FH Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
7	FH Universitas Sriwijaya (Sumatera Selatan)	Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km.32 Inderalaya Ogan Ilir30661	18	FH Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	FH Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A	19	FH Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
9	FH Universitas Lampung	Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145	20	FH Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
10	FH Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan, Serang Banten	21	FH Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
11	FH Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat	22	FH Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat

Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)

PERGURUAN TINGGI		ALAMAT	NO	PERGURUAN TINGGI	ALAMAT
23	FH Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur	33	FH Universitas Khairun (Ternate)	Kampus II Kelurahan Gambesi, Jl. Raya Pertamina KotaK Pos 53 Ternate 97719
24	FH Universitas Tanjungpura	Jl. Jenderal Achmad Yani/Jl. Sosiologi Pontianak Kotak Pos 1049 Kalimantan Barat	34	FH Universitas Cenderawasih	Jl. Kamp Wolker Kampus Baru Waena - Jayapura - Papua 99358
25	FH Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah	35	FH Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunijuk, Merawang-Bangka, Kepulauan Bangka Belitung
26	FH Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119	36	FH Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
27	FH Universitas Lambung Mangkurat (Kalimantan Selatan)	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123	37	FH Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
28	FH Universitas Hasanudin (Sulawesi Selatan)	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Tamalanrea, Makasar 90245	38	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Polewali, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
29	FH Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako Tondo, Jl. Soekarno Hatta KM.9, Palu Sulawesi Tengah - 94118	39	Universitas Negeri Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
30	FH Universitas Haluleo (Sulawesi Tenggara)	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari 93232	40	FISIP Universitas Musamus	Jl. Kamizaun Mopah Lama Merauke
31	FH Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115	41	FH Universitas Borneo	Jl. Amal Lama No 1, Tarakan Kalimantan Utara PO. BOX 170
32	FH Universitas Patimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon	42	FH Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal, Jawa Tengah

Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



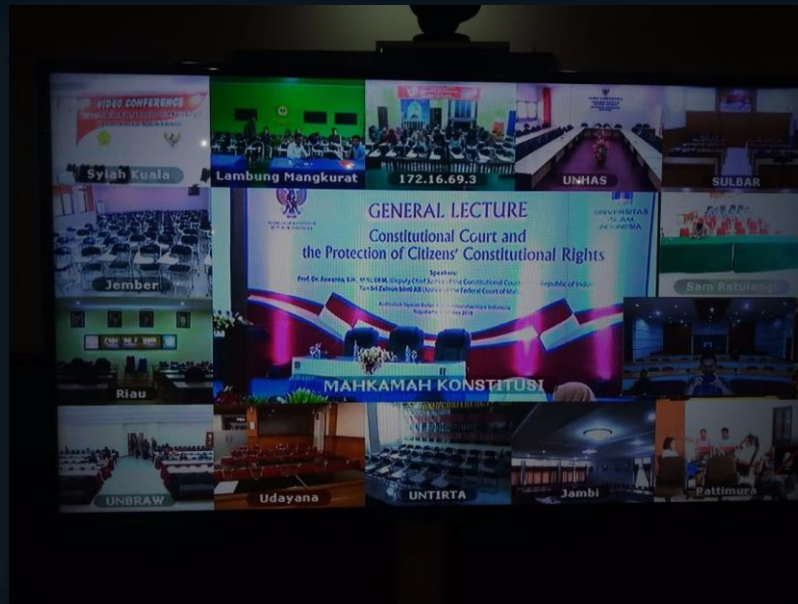
Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)



Persidangan Jarak Jauh Pengujian UU Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

6 Agustus 2018

Pemanfaatan lain dari fasilitas *Video Conference*



Kuliah Umum /
General Lecture
dan Symposium
Nasional /
International



**TERIMA
KASIH**